

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelayanan pembuatan paspor sebagai dokumen perjalanan lintas negara di Kantor Imigrasi Kelas I Padang belum cukup baik. Karena lemahnya pengawasan secara fungsional oleh instansi vertikal sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan petugas imigrasi masih ada dan maraknya calo maupun oknum petugas imigrasi yang bermain dalam pembuatan paspor. Walaupun dari segi sarana dan prasarana sudah ditingkatkan namun tidak menekan angka pertumbuhan calo. Sehingga calo tersebut bebas beroperasi di sekitar Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang.
2. Kendala yang sering ditemui dalam pembuatan paspor secara hukum yakni lemahnya pengawasan intern terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga masih terdapat pelanggaran terhadap PP No. 47 Tahun 2014 tentang tarif pembuatan paspor biasa, Pasal 22 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang jangka waktu pengurusan paspor, dan Surat Edaran Kemenkumham No. IMI-GR.01-1617 tentang Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SOP Paspor Biasa. Selain itu dari sisi petugas imigrasi terdapat kendala berupa kurangnya perhatian masyarakat terhadap data pribadi, kerusakan pada mesin pencetakan paspor dan jaringan. Sedangkan dari sisi pemohon paspor terkendala dengan

pelayanan yang kurang memadai, antrean, pembayaran ke BNI, berkas yang kurang lengkap / sesuai, lamanya proses pengambilan paspor dan jumlah pegawai imigrasi yang sedikit. Kendala tersebut dapat dibenahi apabila faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terpenuhi. Kemudian kepedulian dan perhatian dari pemohon paspor maupun petugas imigrasi semakin meningkat dengan menekan gaya hidup instan dan serba mudah. Sehingga tak terjadi lagi mutualisme antara pemohon paspor dengan calo maupun oknum petugas imigrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Sebaiknya pelayanan pembuatan paspor sebagai dokumen perjalanan lintas negara harus ditingkatkan baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun dari fasilitas yang mendukung. Dari segi petugas imigrasi diharapkan agar semakin aktif dan profesional dalam menghadapi keluhan pemohon paspor. Tak hanya memberikan keistimewaan pada golongan tertentu tetapi juga memberikan kebijakan yang adil pada masyarakat umum. Bagaimanapun masyarakat adalah pemerintahan tertinggi yang harus dihormati dan dihargai hak-haknya.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk membuat data base nasional untuk memperlancar administrasi kependudukan. Pemerintah harus merangkum semua data pribadi warga negara kemudian didistribusikan kepada instansi publik terkait. Supaya tidak terjadi lagi ketidaksesuaian data pribadi

pemohon antar dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pengawasan intern dan fungsional secara rutin kepada PNS dan pegawai lainnya yang bekerja di Imigrasi supaya tidak terjadi lagi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu Ditjen Imigrasi harus membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya keluhan, kritik dan saran dari pemohon paspor. Baik berupa antrean, tata cara pembuatan paspor, fasilitas pendukung, tarif dan jangka waktu, sosialisasi peraturan serta hal lainnya. Sedangkan kepada pemohon paspor harus lebih aktif mencari informasi tentang tata cara pembuatan paspor, teliti melengkapi berkas, dan mengikuti proses yang ditetapkan. Apabila masyarakat dan petugas imigrasi mematuhi aturan hukum, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam pembuatan paspor dan biro jasa / biro travel / perantara / calo akan hilang dengan sendirinya. Sebab tidak ada celah hukum dan hubungan timba balik antara pemohon paspor dengan biro jasa / biro travel / perantara / calo atau hubungan timba balik antara petugas imigrasi dengan biro jasa / biro travel / perantara / calo tersebut.

